STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA

The Principal's Leadership Strategy In Implementing Inclusive Education Policies In SMP Negeri 2 Yogyakarta

Zahra Fadhilah Putri¹, Nauval Fauzan Miarakhman² dan Rimalia Dwi Krisnawati³ Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang- Jl. Colombo No.1 Depok, Sleman Yogyakarta e-mail: zahrafputri@gmail.com¹; nauvalfauzan06@gmail.com²; rimaliadwik@gmail.com³

Diterima: 2 Oktober 2020; Direvisi: 19 November 2020; Disetujui: 30 Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.74

Abstract

Education is an important thing in human life. The success of an educational institution is largely determined by the leadership role of the principal. The principal is required to be able to bring the school towards the achievement of predetermined goals. Currently, the city of Yogyakarta has established an inclusive school policy as contained in the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 21 of 2013 Article 3 concerning the Implementation of Inclusive Education as a form of equity and a form of education without discrimination. However, in reality this policy is not yet clearly known by school principals, so it requires appropriate leadership strategies in dealing with problems and managing good inclusive schools to improve school quality. One of them is SMPN 2 Yogyakarta, which transforms the regular school system into an inclusive school. Therefore, this study aims to identify and describe the issues of inclusive education faced by the principal of SMP Negeri 2 Yogyakarta as well as to describe the leadership strategy of the principal in overcoming issues of school principals in inclusive schools at SMPN 2 Yogyakarta. This research uses descriptive qualitative research with data collection methods using interview techniques, observation, and documentation. The achievements of SMPN 2 Yogyakarta after following the policy to turn schools into inclusive schools include: sports and journalism.

Keywords: Strategic, Leadership, Inclusive Education

Abstrak

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu membawa sekolah ke arah tercapainya tujuan yang telah di tentukan. Saat ini, kota Yogyakarta telah menetapkan kebijakan sekolah inklusif seperti yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sebagai salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi. Namun, pada kenyataannya kebijakan ini belum diketahui secara jelas oleh para kepala sekolah, sehingga diperlukan strategi kepemimpinan yang tepat dalam menghadapi permasalahan dan mengelola sekolah inklusif yang baik guna meningkatkan mutu sekolah. Salah satunya SMPN 2 Yogyakarta yang mengubah sistem sekolah reguler menjadi sekolah inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan pendidikan inklusif yang dihadapi kepala SMP Negeri 2 Yogyakarta serta mendeskripsikan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan sekolah inklusif di SMPN 2 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Berbagai prestasi SMPN 2 Yogyakarta yang diraih setelah mengikuti kebijakan untuk mengubah sekolah menjadi sekolah inklusif diantaranya: bidang olahraga dan jurnalistik.

Kata Kunci: Strategi, Kepemimpinan, Inklusif

PENDAHULUAN

UNICEF, Habibi (1999) dalam Hasyi, Makiko (2014) memperkirakan 150 juta anak penyandang disabilitas hanya 3% di negara berkembang yang terdaftar di sekolah. Di Filipina, salah satu penelitian menemukan bahwa sebesar 25% anggota keluarga yang menyandang disabilitas meningkatkan dapat kemungkinan anak usia 7 - 16 tahun tidak pernah bersekolah. Begitu pula di Thailand hampir semua anak usia 6 9 hingga tahun yang bukan penyandang disabilitas pernah bersekolah pada tahun 2005, namun dari mereka yang memiliki gangguan berjalan atau bergerak tidak pernah bersekolah (UNICEF, 2014). Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan di Indonesia, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional Data (SUSENAS) tahun 2018 mengindikasikan hampir 3 dari 10 anak dengan disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan. Saat ini, anak usia 7-18 tahun dengan disabilitas yang tidak bersekolah mencapai angka hampir 140.000 orang (Ijazah,2019). Maka, dapat diartikan keikutsertaan anak-anak penyandang disabilitas sangat rendah dalam memperoleh

pendidikan bahkan kebijakan yang ada dirasa sangat kurang dalam menangani hal ini.

Undang-undang diskriminatif seringkali gagal untuk mengakui atau secara khusus menghalangi beberapa anak penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan. Anak-anak penyandang disabilitas secara signifikan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk bersekolah dibandingkan rekan-rekan mereka yang bukan penyandang disabilitas (UNICEF, 2014). Disabilitas menjadi faktor yang dinilai lebih signifikan dalam kaitannya dengan pengucilan dari pendidikan daripada gender atau lokasi geografis, dan hidup dalam kemiskinan serta memiliki orang tua penyandang disabilitas juga meningkatkan kemungkinan seorang anak tidak bersekolah. Beberapa alasan mengapa anak-anak disabilitas tidak penyandang bersekolah, tidak terbatas pada: orang tua tidak tahu bahwa anak mereka memiliki hak atas pendidikan, orang tua memiliki harapan yang rendah terhadap anak mereka, keluarga yang malu dengan anak mereka yang menyandang disabilitas atau tidak percaya pada potensinya, anak tersebut tinggal di sebuah institusi, dan gedung sekolah tidak dapat diakses(UNICEF, 2014). Anak-anak penyandang disabilitas tidak disertakan dalam kebijakan utama yang terkait dengan pendidikan.

Untuk mengatasi diskriminasi pendidikan bagi anak disabilitas, lahirlah gerakan global Education For All (EFA) dipimpin oleh yang UNESCO pada tahun 2015 merupakan hasil adopsi dari Deklarasi Dakkar yang diselenggarakan pada tahun 2000 oleh World Education Forum. Gerakan ini merepresentasikan internasional pergerakan dan komitmen untuk memastikan semua anak dan orang dewasa menerima kualitas pendidikan dasar yang baik. Penerjemahan gerakan ini menjadi bagian dari kebijakan di Indonesia yaitu Pendidikan Untuk Semua (PUS) mencerminkan bahwa peran pendidikan inklusif sangat diperlukan terutama di negara-negara berkembang seperti salah satunya di Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Pendidikan Kementerian Nasional (PERMENDIKNAS) Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif, menjelaskan terkait

pentingnya implementasi pendidikan inklusif.

Namun, faktanya saat ini sekolah inklusif hanya sebanyak 29.317 sekolah sebagai penyelenggara inklusif di seluruh Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK (DAPODIK, Per 31 Januari 2019). Hal ini menyatakan hanya 11% jumlah sekolah di Indonesia yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jumlah ini juga menyatakan bahwa belum siapnya implementasi inklusif di pendidikan sekolah. Ditambah dengan pernyataan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY yang menerima aduan dari beberapa wali murid yang kesulitan mendaftarkan anaknya masuk sekolah inklusi (Radar Jogja, 2019). Hal tersebut menambah deretan permasalahan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Berbeda halnya dengan Sekolah Pertama Menengah Negeri telah Yogyakarta yang mengimplementasikan kebijakan inklusif dengan mengganti kebijakan sekolah regular sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hadirnya tentu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

SMP Negeri 2 Yogyakarta menjadi sekolah penerapan kebijakan inklusif yang sampai sekarang tetap mempertahankan eksistensi dan prestasi di bidang akademis maupun non akademis. Eksistensi dan prestasi SMPN 2 Yogyakarta sebagai sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala yang dialami oleh sang kepala sekolah yakni Widayat Umar. Ketepatan strategi dalam memimpin

LANDASAN TEORI

Riset ini menjadikan strategi kepemimpinan sebagai landasan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Untuk itu, perlu diketahui konsep kepemimpinan yang dengan sesuai kebijakan pendidikan inklusif. Menurut Gunawan, (2017) Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi dan memberikan aspirasi serta mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam

lembaga ini sangat diperlukan, dan ditambah dengan maraknya kendala, dan tantangan tuntutan dalam pengimplementasikan sekolah inklusif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini membahas mengenai permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusif dan bagaimanakah strategi kepala sekolah SMPN 2 Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan sekolah inklusif. Hal ini sesuai dengan tujuan Mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi kepala sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah inklusif dan strategi kepala sekolah dalam mengatasi kebijakan sekolah permasalahan inklusif di SMPN 2 Yogyakarta.

memimpin lembaga pendidikan dikatakan oleh Wahab, (2008) bahwa kepemimpinan pendidikan adalah suatu kualitas kegiatan-kegiatan dan integrasi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Fungsi kepemimpinan yang bertalian dengan penciptaan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan adalah:

- Memupuk dan memelihara sikap kerja sama demi tercapainya tujuan sekolah;
- Menanamkan dan memupuk perasaan kepada para warga sekolah bahwa mereka merupakan bagian dari organisasi sekolah secara keseluruhan.
- 3. Memupuk dan memelihara semangat semua warga sekolah melalui pemberian penghargaan terhadap usaha-usaha yang baik dari anggotanya;
- 4. Mengusahakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan, baik ruangan, fasilitas, maupun situasinya; dan
- 5. Menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya untuk mengembangkan kesanggupan-kesanggupan anggotanya, sehingga ia dapat diakui dan diterima oleh bawahan secara wajar.

Strategi Kepemimpinan Inklusif.

Pemimpin harus dapat melihat adanya kekuatan, kelemahan, kesempatan, tantangan yang berada dalam perusahaan sebagai bentuk strategi kepemimpinan. Davies & Davies(2014) dalam Partono (2014)menyajikan indikator untuk sejauh mana individvidu mengukur memiliki kemampuan dalam mengelola organisasi. Indikator tersebut adalah (Partono, 2014):

- Menunjukkan orientasi strategis dalam tindakan dan keputusan
- Mampu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan nyata
- Mampu mengarah orang dan tujuan organisasi
- 4. Mampu mengarahkan keputusan yang efektif
- Mampu mengembangkan kemampuan strategis yang bermanfaat

Keberadaan kepala sekolah dalam pendidikan setiap jenjang sangatlah penting, karena kewenangan tertinggi dalam suatu sekolah berada pada kepala sekolah. Maka kepala sekolah menjadi figur sentral sebagai top manager dan menjadi penentu keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai seorang pemimpin yang berperan sebagai top manager, pemimpin harus dapat menjadikan seluruh komponen didalamnya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, seorang pemimpin perlu mengetahui elemen apa saja yang perlu dikuasai. Berikut tiga elemen kunci dalam kepemimpinan inklusif, yaitu (Basri,2010):

 Kepemimpinan inklusif memberikan peluang kepada setiap orang dengan memberikan kesempatan secara adil untuk mempengaruhi keputusan, pelaksanaan, dan kebijaksanaan. 2. Kepemimpinan adalah proses yang ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan, prosedur, pemahaman, dan nilai yang tetap bertahan sepanjang masa. Kepemimpinan inklusif tidak mengasosiasikan kepemimpinan yang secara dominan berpusat pada individu melainkan suatu proses kolektif, dimana di dalamnya banyak orang bekerja secara bersama-sama

Konsep Dasar dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan bakat istimewa (CIBI). Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing (Mujito. dkk, 2012). Sekolah inklusif menjadi salah satu metode pendidikan yang dikembangkan dan dianut oleh Indonesia dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan dimana semua siswa dengan kebutuhan khusus diterima di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya sebagaimana yang ditegaskan melalui Surat Edaran Dirjen DIKDASMEN Nomor 380 Tahun 2003. Pelaksanaan program sekolah inklusif di Indonesia secara tegas diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan

- dengan berbagai macam cara untuk menghasilkan sesuatu.
- 3. Kepemimpinan inklusif dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kepemimpinan inklusif meningkatkan suatu hasil yaitu inklusi. Bukan hanya proses kepemimpinan yang bersifat inklusif, tujuan akhir dari proses tersebut yang merupakan rangkaian dari proses tersebut adalah inklusif.

Nasional(PERMENDIKNAS) 70 No. Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif. tersebut kemudian Peraturan diimplementasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 4 yang menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini tentunya sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 5 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan tidak terkecuali warga negara dengan kelainan fisik emosional mental intelektual dan/fisik sosial.

Pendidikan inklusif memiliki pengertian, yaitu pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah regular (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti berkelainan, lamban belajar (slow learner) maupun yang berkesulitan belajar lainnya (L.K.M. Marentek, 2007). Komponenkomponen yang perlu diketahui dalam memimpin lembaga pendidikan dengan implementasi kebijakan inklusif, yaitu sebagai berikut (Wahyudi, 2016):

1. Manajemen Kesiswaaan

Siswa merupakan salah satu komponen utama dalam proses pendidikan. Siswa dalam pendidikan inklusif sangat beragam karakteristik dan juga jenis ketunaan.

2. Manajemen kurikulum

berkebutuhan Anak khusus(ABK) memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Untuk itu, kurikulum penyelenggaraan pendidikan inklusif harus mencakup kuriulum nasional yang merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusif adalah kurikulum anak normal yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa (Tarmansyah, 2007).

3. Manajemen Tenaga Pendidik

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di kelas minimal terdiri dari tiga orang tenaga pendidik, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus.

4. Manajemen Sarana Prasarana

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sarana prasarana yang dibutuhkan lebih bervariasi, karena berkebutuhan khusus memerlukan beberapa sarana prasarana khusus penunjang proses menyesuaikan pembelajaran, yang jenis kebutuhan siswa khusus.

5. Manajemen Keuangan/Dana

Manajemen keuangan pada sekolah inklusif harus mengalokasikan dananya untuk sebagian dananya untuk berbagai keperluan khsusus, seperti: penilaian, modifikasi kurikulum, media, metode dan insentif bagi tenaga ahli yang terlibat.

 Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat)
 Sekolah perlu melakukan suatu upaya untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar mau turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan

7. Manajemen Layanan Khusus

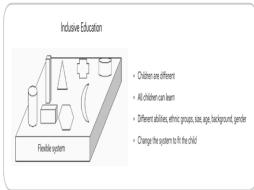
pendidikan inklusif.

Manajemen layanan khusus merupakan suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kebutuhan kepada siswa untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam implementasinya, analisis perbedaan pendekatan sekolah inklusif dengan sekolah reguler ialah sebagai berikut (UNICEF, 2014).

Pendekatan Tradisional (termasuk integrasi)	Pendekatan Inklusif
Fokus ke siswa	Fokus dalam kelas
Penilaian siswa oleh spesialis	Memeriksa faktor mengajar/belajar
Diagnosis/ menentukan program kebutuhan siswa "khusus".	Penyelasaian masalah secara kolaborasi
Merubah/mengulang mata pelajaran	Strategi bagi pengajar
Manfaat bagi siswa berkebutuhan khusus untuk diintegrasikan	Lingkungan ruang kelas yang adaptif dan mendukung.
Formal profesional, keahlian khusus dan dukungan formal	Hak semua murid
Intervensi teknis (pengajaran khusus, terapi)	Perubahan sekolah
	Dapat memanfaatkan semua hal bagi semua unsur sekolah
	Dukungan dan keahlian informal dari semua
	guru Pengajaran yang baik untuk semua.

Sumber: United Nations Children's Fund (UNICEF), 2014



Sumber: United Nations Children's Fund (UNICEF),

Gambar 1. Konsep Pendidikan Inklusif

Pentingnya menerapkan pendidikan inklusif dijelaskan oleh UNICEF (2014) antara lain, yakni: Pendidikan inklusif mengarah pada peningkatan hasil belajar untuk semua, membantu untuk memastikan bahwa anak-anak dengan dan tanpa mengalami hambatan dapat tumbuh hidup dan tumbuh bersama. Praktik-praktik inklusif tersebut membantu anak-anak bersikap toleran terhadap

orang lain serta pendidikan inklusif juga dapat menghemat biaya, dengan kata lain kurangnya pendidikan yang memadai menjadi faktor risiko utama kemiskinan dan pengucilan bagi semua anak, baik dengan maupun tanpa disabilitas. Untuk itu. menyediakan pendidikan inklusif yang berkualitas dalam jangka panjang mengurangi ketergantungan dapat pada negara dan meningkatkan kapasitas ekonomi potensial mereka. Untuk itu, dalam implementasinya di SMP N 2 Yogyakarta menerapkan sistem kebijakan pendidikan inklusif yang dicanangkan pemerintah daerah. Hal ini, berdasarkan strategi kepemimpinan yang dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan sehingga berhasil bertahan dan mengembangkan prestasi sekolah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moelong, 2005). Sesuai dengan penelitian ini yang mendeskripsikan strategi kepemimpinan SMP Negeri 2 Yogyakarta dalam mengimplementasi suatu kebijakan baru yakni pendidikan inklusif dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang ada.

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti (Safitri, 2012). Dalam mendapatkan data penelitian kualitatif akurat, peneliti yang menggunakan instrumen berupa pedoman observasi/pengamatan, dokumentasi dengan menggunakan pedoman alat perekam dan wawancara. Pengumpulan data dari obyek dan sasaran penelitian melalui penggunaan instrumen disebut sebagai teknik atau prosedur pengumpulan data, yaitu:

1. Menurut Suharsimi Arikunto (2006) bahwa observasi adalah

kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh tindakan telah efek mencapai sasaran. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pengamatan langsung secara bagaimana kegiatan dan prose pembelajaran di SMP Negeri 2 Yogyakarta sebagai dampak dari keberhasilan strategi kepemimpinan yang digunakan. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar terkait kondisi sekolah dan proses pembelajaran di SMPN 2 Yogyakarta.

2. Wawancara dilakukan dengan panduan wawancara atau instrumen pertanyaan sebagai bentuk mengumpulkan data dan bentuk pertanyaan yang diajukan adalah takterstruktur dan terstruktur. instrumen pertanyaan menitikberatkan kepada pertanyaan penelitian meliputi implementasi kebijakan inklusif di SMPN 2 Yogyakarta, kajian strategi kepemimpinan dalam pendidikan inklusif. hambatan. kendala dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan baru yakni inklusif di SMP N 2 Yogyakarta beserta aspek-aspek pendukungnya.

Adapun dalam menentukan informan penelitian, peneliti teknik menggunakan satu yaitu Purposive sampling, atau informan dipilih berdasarkan yang pertimbangan-pertimbangan tertentu peneliti. Peneliti memiliki untuk memilih kecenderungan informan yang dianggap mengetahui informasi, mengerti masalah secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi informan yang akurat (Nugrahani, 2014). Oleh karena itu, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yakni Pak Drs. Chaerul Arifin selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum bertugas juga untuk bagian manajerial sekolah yang berpengalaman mengetahui secara mendalam bagaimana pengelolaan **SMPN** Yogyakarta selama 5 (lima) tahun.

Setelah mendapatkan data dari pertanyaan terbuka atau tak-terstruktur akan memunculkan tema-tema. Creswell (2014) menjelaskan bahwa analisis data yang dilakukan untuk penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data berupa teks atau gambar, lalu mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean sekaligus

peringkasan data, dan diakhiri dengan menyajikan data melalui bagan, tabel atau pembahasan. Terdapat lima langkah yang dilakukan dalam menganalisi data penelitian kualitatif, yaitu:

- Mengorganisir data: pada bagian ini, data hasil wawancara dibuat transkip wawancara dengan dibuatkan tabel.
- Memo: mengambil bagian transkrip wawancara yang sesuai dengan teori.
- 3. Mengklasifikasikan tema atau kode: dibuatkan tema sesuai dengan jawaban yang didapatkan dari wawancara. Tema ditentukan berdasarkan teori yang telah ditentukan pada penelitian ini.
- 4. Menafsirkan data: setelah membuat tema pada setiap jawaban dari wawancara, kemudian dapat disimpulkan berdasarkan tema yang telah ditentukan.
- Menyajikan data: pada tahap ini data dapat langsung disajikan di laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian di Bangladesh tahun 2012 menyatakan bahwa Bangladesh memiliki banyak komunitas yang terisolasi secara geografis dan berpengaruh dalam praktik inklusif penerapan yang dihadapkan pada tantangan terkait keterpencilan, bahasa, dan sumber daya, ditambah dengan masalah seperti; kelaparan dan kondisi iklim seperti banjir, perdagangan manusia. Hal mengakibatkan banyak anak-anak di Bangladesh yang tidak mengenyam pendidikan atau bersekolah dan disimpulkan bahwa saat ini terdapat kekurangan sistem pendidikan terpadu, koordinasi, kerja sama, integrasi(Carington, 2019). Berbeda halnya dengan Negara Kamboja, kepercayaan agama dan budaya menjadi salah satu faktor yang mendasari munculnya sikap negatif bagi keluarga dengan anak normal untuk menyekolahkan anaknya dalam sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus(Hayashi,2014).

meningkatkan Untuk partisipasi masyarakat menyelenggarakan dalam pendidikan inklusif dan menjawab pendidikan nondiskriminatif, maka Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubenur DIY No. 21 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan di DIY wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi semua sekolah di Yogyakarta untuk merubah kebijakan lama yakni sekolah reguler menjadi inklusif. Salah satunya, SMPN 2 Yogyakarta yang menerapkan model kelas reguler penuh, yakni menggabungkan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler dalam satu kelas. Pemilihan model kelas tersebut dilandaskan karakter kelas inklusif dan bertujuan agar dapat menciptakan sikap toleransi antar para siswa dan saling menghargai serta menyayangi. Dilihat dari segi anggaran sekolah, pemilihan model ini juga dinilai lebih hemat dalam menggunakan fasilitas bersamaan antara siswa secara berkebutuhan dan siswa reguler dalam satu kelas.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya pada tahun 2010 – 2014, SMP Negeri 2 Yogyakarta pernah menangani siswa luar biasa dengan kategori cerdas istimewa. Cerdas istimewa(CI) ialah siswa yang memiliki IQ diatas rata - rata dan penanganannya dalam sekolah menyediakan satu kelas khusus berisikan 25 siswa CI. Namun, kelas tersebut sudah tidak diberlakukan lagi sejak tahun 2014 dan saat ini SMPN 2 Yogyakarta berbasis satuan kredit satuan (SKS), yakni program memberikan layanan cerdas yang kesempatan bagi siswa untuk dapat lulus dalam waktu hanya 2 (dua) tahun. Terdapat satu kelas SKS yang meluluskan siswa hanya dengan 8 semester yang dilakukan dengan sistem seleksi dari peserta didik yang berminat.

Namun, pada tahun 2017 setelah kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewajibkan semua sekolah menjadi sekolah inklusif dikeluarkan (Pergub DIY No. 21 Tahun 2013), jenis siswa berkebutuhan khusus yang mendaftar lebih beragam, seperti: gangguan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan pemusatan perhatian(pemahaman tidak maksimal), cerdas tetani dalam tidak lancar komunikasi atau pergaulan. Ditambah dengan adanya regulasi sistem zonasi yang telah ditetapkan berdampingan dengan kebijakan sekolah inklusif, maka sekolah harus menerima anak reguler maupun ABK tamat SD di daerah sekitarnya/terdekat.

Maka dari itu, penanganan khusus di awal yang dilakukan adalah tes psikologi untuk mendeteksi IQ dan perilaku calon peserta didik. Ketika diketahui terdapat calon peseta didik yang berpotensi memiliki keadaan khusus, selanjutnya sekolah akan meminta bantuan psikologi untuk menindak lanjuti. Jika anak tersebut berkebutuhan khusus dan sekolah merasa tidak mampu mendidik anak tersebut dikarenakan diperlukan penanganan yang terlalu khusus maka calon peserta didik tersebut akan diminta surat untuk pemindahan ke sekolah berkebutuhan khusus. Namun, jika anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki penanganan yang dapat diatasi oleh sekolah, maka dapat diterima sebagai siswa.

Tantangan Dan Permasalahan SMPN 2 Yogyakarta Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pendidikan Inklusif

Tarnoto. (2019)menjelaskan terdapat beberapa aspek permasalahan yang hadir dalam pendidikan inklusif yakni: Berdasarkan enam kategori permasalahan utama yang dikeluhkan oleh guru, vaitu dari Kurangnya Guru Pendamping Kelas (GPK) sebesar 27,39%, kepedulian orangtua terhadap penanganan ABK kurang (47,27%), ABK dengan permasalahan berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda (35,29%), belum siapnya sekolah dengan program sekolah inklusif baik dari segi administrasi dan SDM (75%), perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap pelaksanaan sekolah inklusi kurang (24.64%),minimnya pengetahuan masyarakat terkait pendidikan inklusi dan ABK (41.76%), salah satu permasalahan terbesar adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan inklusif (87.10%).

Faktanya di SMPN 2 Yogyakarta terdapat beberapa permasalahan pada awal mula pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, yakni: tidak adanya perlakuan khusus yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan pemahaman khusus bagi sekolah inklusif, tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur penanganan dan pengelolaan sekolah inklusif hanya menggunakan peraturan dinas dalam penanganan anak disabilitas. Hal tersebut berdampak ketidaksiapan juga pada sekolah dalam menerima anak berkebutuhan khusus dengan jenis tertentu, seperti yang terjadi di lapangan. Kurangnya partisipasi atau kurangnya kepedulian masyarakat dan sikap yang relatif apatis terhadap kebijakan pendidikan, ditambah dengan dana pengelolaan pendidikan yang masih belum cukup dirasa untuk memaksimalkan dan mendukung proses pembelajaran inklusif. Hal ini menunjukan belum adanya kesesuaian antara kebijakan yang tertuang dalam PERMENDIKNAS No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif dengan praktik di lapangan, sekaligus menjadi tantangan SMPN 2 Yogyakarta, antara lain: penjamin pendidikan inklusif oleh pemerintah dan pemerintah daerah, penyediaan guru pendamping khusus oleh pemerintah, bantuan penyelenggaraan pendidikan inklusif. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan inklusif. penghargaan dan sanksi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Strategi SMPN 2 Yogyakarta Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Inklusif

Sebagian besar negara Eropa menyatakan niatnya untuk mewujudkan pendidikan inklusif sesuai dengan definisi lanjutan. Namun, hasil penerapannya dalam praktik sama sekali tidak meyakinkan bahkan praktik pendekatan sempit terhadap inklusif yang sangat bervariasi, dan tidak mencerminkan definisi ideal seperti yang disajikan di sini. Jumlah populasi ABK terbesar berada di negara-negara berkembang, maka hal Ini menandakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus di negara berkembang memerlukan penanganan yang tepat. Faktanya di semua negara, terdapat kesenjangan antara formulasi dan realisasi pendidikan inklusif (Graham Jahnukainen 2011: Göransson dan Nilholm 2014; Nes 2010; Smyth dkk. 2014). Hal itu yang membuat lahirnya pertanyaan, apakah pendidikan inklusif telah menghasilkan hasil yang diinginkan dalam pembelajaran siswa.

Pemimpin di SMPN 2 Yogyakarta mengelola sekolah dengan kebijakan inklusif sesuai dengan pemikiran narasumber yakni Pak Drs. Chaerul Arifin yang memiliki peran sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan menguasai manajerial sekolah sejak tahun 2010. Pak Chaerul juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan studi banding hingga ke Korea Selatan demi mengetahui bagaimana dan pengelolaan penanganan sekolah terutama bagi siswa dan guru. Bagi pak chaerul pemimpin ialah sebagai berikut:

"Pemimpin merupakan aspek penting bagi suatu lembaga namun, pada dasarnya sekolah bisa berjalan tanpa pemimpin akan tetapi, percepatan dan tujuan serta penentu dari berbagai persepsi anggota yakni penentu arah dari sebuah visi dan pemimpin yang bagus itu dapat melihat sesuatu yang baru atau memberikan inovasi."

Dalam mengimplementasikannya memerlukan strategi yang tepat mengelola sekolah dengan kebijakan baru. Ditinjau dari berbagai aspek manajemen, strategi kepemimpinan kepala SMPN 2 Yogyakarta dalam mengelola sekolah dapat diketahui, sebagai berikut:

1. Manajemen Kesiswaaan

Salah satu penilaian keberhasilan strategi sekolah adalah dengan melihat bagaimana sekolah tersebut dapat bertahan dan berkembang di tengah permasalahan yang dihadapi. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa dan mencetak berbagai prestasi merupakan cara efektif dalam mengimplementasikannya. Penyelesaian masalah pada siswa melalui beberapa tahapan, yaitu: adanya rapat tertutup antara bagian kesiswaan dan guru bimbingan konseling. Selanjutnya, ketika tidak bisa ditangani maka didiskusikan antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan ketika permasalahan sudah *crusial* maka dilaksanakannya rapat khusus yang dihadiri orang yang bersangkutan dengan kasus tersebut.

SMPN 2 Yogyakarta memiliki cara mengajak guru untuk menjadikan muridnya berprestasi di bidang akademik dan nonakademik yakni dengan adanya pemahaman siswa reguler dengan yang berkebutuhan khusus(pemakluman) dan membangun hubungannya yang akrab antara siswa reguler. Prestasi dibangun dengan motivasi secara perlahan nantinya

akan berkembang. Untuk motivasi peserta didik tersebut maka adanya kerja sama antara guru di sekolah dan wali murid berupa diskusi rutin.

Untuk mengetahui potensi para peserta didik melalui pengisian form prestasi dan bakat pada saat awal masuk sehingga dapat memudahkan sekolah dalam mengembangkan potensi vang dimiliki oleh peserta didik. Prestasi yang telah diraih peserta didik di SMPN 2 Yogyakarta setelah melaksanakan kebijakan inklusif baik dalam bidang akademik maupun nonakademik, yaitu: prestasi dari ekstrakurikuler divisi kepenulisan dan telegrafi tingkat nasional dan penghargaan di tingkat Asia Tenggara dari cabang olahraga renang serta dalam bidang akademik dapat dilihat dari indeks nilai ujian nasional(UN) yang memiliki rata-rata nilai 8.20 pada tahun ajaran 2018/2019 dengan keterangan siswa lulus 100%.

2. Manajemen kurikulum

Berdasarkan observasi pelaksanaan kurikulum di SMPN Yogyakarta menggunakan kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus ditambah dengan penanganan dari guru pendamping. Hal tersebut berdasarkan kutipan dalam wawancara yakni:

"SMPN 2 Yogyakarta saat ini memakai Kurikulum 2013 dari tahun 2017 sudah menjadi sekolah inklusif. Dalam kegiatan pembelajaran yang menyangkut

kurikulum, pemerintah daerah menyerahkan kepada pihak sekolah dengan tetap mengacu pada aturan atau arahan dari pemerintah yang diimplementasikan ke **SMPN** 2 Yogyakarta dengan pertemuan/diskusi diadakannya vang dihadiri semua unsur sekolah terkait aturan atau pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kebijakan inkusif. Mulai dari penerimaan siswa dengan kebutuhan khusus (ABK), pengembangan kurikulum (modifikasi) untuk ABK, kegiatan yang bisa diikuti oleh ABK sesuai minat dan bakatnya dan sekolah menyerahkan kepada guru kelas untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar di kelas bisa berjalan lancar. Ditambah dengan adanya 4 (empat) guru pendamping bagi siswa berkebutuhan khusus guna membantu pelaksanaan pembelajaran. Namun, disayangkan tidak ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terkait hal ini. Bagi pemerintah pada awal kebijakan inklusif berlaku yang terpenting pihak sekolah mempunyai keikhlasan hati dan kebesaran hati dalam menerima murid inklusif di SMPN 2 Yogyakarta sehingga kebijakan pendidikan inklusif dapat berjalan baik di sekolah."

3. Manajemen Tenaga Pendidik

Salah satu aspek dari kurangnya implementasi pendidikan inklusif adalah kurangnya kompetensi guru yang relevan (Tangen, 2005). Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 2 Yogyakarta terdapat guru kelas, mata pelajaran dan 4 guru secara khusus diberikan pelatihan mendampingi untuk dan memaksimalkan potensi anak berkebutuhan khusus. Pengawasan kepada guru juga dilakukan dengan berbagai seperti pertemuan kegiatan, khusus guna memotivasi guru berupa briefing pada pagi hari Senin. Selain itu,

workshop peningkatan kompetensi sesuai materi, seperti "soft skills bagi siswa". Kegiatan pembelajaran di kelas mengikuti proyek atau western learning juga adanya pembinaan karakter seperti: outbond, pembinaaan rutin termasuk pemberlakuan reward dan punishment, dengan melakukan pemanggilan bagi guru yang dinilai bermasalah dan hadiah atau ucapan bagi guru yang berprestasi.

Pengetahuan diperlukan yang pemimpin dalam membuat hubungan harmonis dengan guru ialah mengetahui sifat, gaya komunikasi, dan penyebab permasalahan serta sifat terbuka. Implementasinya ke dalam komunikasi yang dilakukan semua guru dan staff di SMPN 2 Yogyakarta yakni adanya diskusi terbuka yang dilakukan kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah bagi para anggota sekolah mengenai kesulitan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Diskusi ini dilakukan para guru ketika mengalami kendala dalam proses mengajar atau ketika menangani siswa. Diskusi ini bersifat santai, tidak formal dan lebih mengarah pada bercerita akan tetapi, melihat penyebab tetap apa permasalahannya agar nantinya ditemukan solusi. Jikalau diskusi ini belum cukup menyelesaikan permasalahan atau belum mampu memberikan solusi maka akan ditindaklanjuti dengan rapat yang diikutsertakan semua anggota sekolah.

4. Manajemen Sarana Prasarana

Dukungan keberhasilan pembelajaran di sekolah inklusif dapat dilihat dari kontribusi kesiapan dalam hal sarana dan prasarana. Amka (2019) dalam journal of ICSAR menjabarkan rincian seperti ruang kelas yang dilengkapi dengan peralatan, media, dan sumber belajar yang memadai, fasilitas khusus yang aksesibel bagi ABK, sarana pendukung mobilitas ABK sesuai dengan jenis kelainannnya, kamar mandi yang aksesibel bagi pengguna kursi roda, alat bantu belajar, kursi roda dan tongkat putih bagi tunanetra serta alat bantu menulis Braile. Sekolah memiliki kewajiban dalam memenuhi standar sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Walaupun terdapat kendala terkait pembiayaan penunjang fasilitas sekolah inklusif namun, SMPN 2 berusaha Yogyakarta memfasilitasi siswanya semaksimal kemampuan sekolah untuk mendukung potensinya, baik dalam proses belajar dan mengajar maupun meraih prestasi, sebagai contohnya: fasilitas dalam ruang kelas sebagai penunjang proses pembelajaran dan pengajaran juga diberikan tambahan adanya sarana penunjang bagi siswa berkebutuhan khusus seperti: sumber belajar bagi siswa berkebutuhan khusus, alat bantu sesuai jenis ABK disini dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan guna membantu memudahkan proses belajar mengajar di kelas maupun diluar kelas serta bagi siswa yang memiliki kemampuan dan potensi dalam meraih prestasi maka akan dibantu dari segi penyediaan fasilitas seperti prestasi telegrafi nasional dan renang sampai Asia Tenggara.

5. Manajemen Keuangan/Dana

Dibutuhkan dana dalam berbagai memfasilitasi kondisi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan maka akan terlihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik bidang pendidikan. Pembiayaan pendidikan paling tidak ada tiga persoalan diperhatikan yang harus yaitu (1) financing, menyangkut darimana sumber pembiayaan diperoleh; (2) budgeting, bagaimana biaya pendidikan dialokasikan, (3) accountability, bagaimana anggaran digunakan yang diperoleh dan dipertanggungjawabkan. (Hudayana, 2007).

Hasil wawancara oleh narasumber Wakil Kepala SMPN 2 Yogyakarta menyatakan sumber pembiayaan berasal dari pemerintah pusat melalui daerah dan sumbangan orang dari tua murid. Undang-Undang No. Berdasarkan 20 Tahun 2003 Pasal 12 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan harus memenuhi standar 20% dari APBD nantinya anggaran tersebut setelah sampai di sekolah digunakan untuk melengkapi sarana dan operasional prasarana, dan sekolah. Tanggung jawab kepala sekolah sekaligus strategi pengelolaan pembiayaan dibutuhkan guna mencukupi beragam kebutuhan sekolah inklusif dikarenakan pembiayaan untuk mendukung operasional pendidikan inklusif, khususnya **RAPBS** (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) sekolah tidak pernah menerima subsidi khusus dari pihak Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) untuk pengembangan pendidikan inklusi(Wartomo, 2016). Usaha penggalangan dana dari komite sekolah maupun orang tua murid disertai pembuatan RKAS dengan benar-benar memperhitungkan dan melihat prioritas tahunan sekolah. Selain sebagai kewajiban sebagai lembaga pendidikan untuk membuat RKAS (Nuzula, 2020) hal ini ditujukan agar sekolah memiliki perencanaan yang tepat sehinga anggaran telah teralokasi sesuai kebutuhan sekolah seperti meningkatkan sumber bacaan, biaya operational, dan membayar guru pendamping khusus.

Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat)

SMPN 2 Yogyakarta memiliki hubungan kekeluarga yang tinggi antara para staf, guru sampai pemimpin sekolah. Hal ini dibangun dengan hubungan yang lebih dekat, akrab dan hangat. Oleh karena itu, tidak ada ruangan khusus yang menjadi pemisah antara guru dengan staf dan pemimpin. Kepala SMPN 2 Yogyakarta menciptakan suasana dan pekerjaan yang sehat dan menyenangkan dengan membuat hubungan dilandaskan yang dengan komunikasi. yakni seperti penerapan sapaan, ucapan selamat ketika berprestasi dan sesi diskusi bila terdapat permasalahan serta menciptakan iklim kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar dengan aksi langsung yaitu membuat guru merasa diperhatikan dan pendekatan.

Tidak ada pertemuan dan diskusi terhadap wali murid khusus mengenai sekolah inklusif akan tetapi, adanya pemanggilan terhadap wali murid ketika melihat ada potensi atau diprediksi peserta didik merupakan anak berkebutuhan khusus. Jika tidak ada masalah yang signifikan atau sesuai dengan prediksi maka akan ada tes psikologi bagi siswa tersebut. Ditambah dengan pertemuan orang tua secara rutin mengenai evaluasi pembelajaran di awal siswa baru dan di kelas 9 (Sembilan).

7. Manajemen Layanan Khusus

Penanganan guru terhadap mereka yang mempunyai perilaku yang khusus adalah dengan memaklumi dan memaksimalkan potensi mereka tanpa memaksa. Kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 2 Yogyakarta yaitu dengan memaksimalkan potensi yang ada atau peran yang bisa dilakukan baik itu

peran siswa itu sendiri maupun gurugurunya, sehingga ketika kepala sekolah menerapkan hal tersebut dimana kepala sekolah sangat memanfaatkan peran dari unsur-unsur sekolah maka kepala sekolah tidak merasa memiliki hal berat dalam menangani permasalahan yang terjadi karena adanya kerja sama dari semua unsur.

8. Evaluasi

Evaluasi sekolah dilakukan rutin guna menghasilkan pengetahuan baru bagi dalam menghadapi sekolah berbagai pencapaian kedepannya. Evaluasi Diri Sekolah(EDS) merupakan proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Pelayanan Minimun (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kab/kota. Di SMPN 2 Yogyakarta EDS dilakukan melalui aplikasi kinerja para tenaga pendidik dan staff yang dinilai oleh siswa dan wali murid, dan evaluasi internal antar pendidik dan staff tenaga dilaksanakan setiap akhir tahun. Kegiatan evaluasi pembelajaran inklusif yang dilakukan adalah melalui beragam ujian, baik ujian harian, tengah dan akhir semester, ujian sekolah, dan penugasanpenugasan lainnya. Melalui kegiatan evaluasi ini maka akan diperoleh hasil apakah belajar siswa, sudah dapat mencapai indikator atau standar yang telah belum. ditentukan atau Jika belum mencapai standar tersebut maka akan diberikan remedial berupa penugasan lain sesuai dengan materinya. Pertanyaan/soal untuk ABK disusun oleh guru pendamping yang bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan belajar siswa ABK.

Untuk siswa ABK yang dinilai untuk mendapatkan mampu standar evaluasi yang sama dengan siswa reguler akan tetapi, berdasarkan kemampuan siswa ABK maka bentuk evaluasinya telah mendapatkan penyesuaian khusus terhadap kemampuan siswa ABK dan nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang lebih rendah. Hal tersebut disesuaikan dengan pendekatan yang telah dipakai guru dalam pembelajaran. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terkait karakter setiap siswa dengan melihat sikap dan watak di setiap proses pembelajaran di kelas dan bagaimana setiap siswa dapat saling memahami siswa lain khususnya siswa berkebutuhan khusus serta perkembangan siswa berkebutuhan khusus.

Beragam permasalahan dan tantangan dalam implementasi kebijakan inklusif yang telah dijabarkan di atas menghadirkan strategi bagi kepala SMPN 2 Yogyakarta dalam mengatasi hal tersebut dan untuk mengembangkan mutu sekolah. Peran kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi melalui keputusan bersama dengan melibatkan semua unsur sekolah dalam menyelesaikan permasalahan di SMPN 2 Yogyakarta.

Adanya kerja sama yang kuat antara semua unsur SMPN 2 Yogyakarta dalam meningkatkan mutu sekolah inklusif menjadi salah satu kegiatan di SMP Negeri Yogyakarta sebagai dampak keberhasilan strategi kepemimpinan yang digunakan. Hal ini terlihat dari bagaimana kepala SMPN 2 menciptakan komunikasi yang baik kepada semua unsur sekolah baik tenaga pendidik, staff, siswa dan orang tua murid dalam bersama-sama menciptakan inklusif di sekolah. Kegiatan ini dapat meningkatkan kedekatan atau rasa kekeluargaan diantara unsur-unsur sekolah maka dari itu adanya komunikasi antara semua unsur dengan pemahaman kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Siswa karakter menghargai dengan dan menghormati siswa lain yang memiliki perbedaan atau berkebutuhan khusus juga menjadi dampak dari lahirnya kerja sama ini. Selain itu, dampak dari adanya kerja sama yang kuat terlihat dari adanya partisipasi orang tua murid yang tinggi dalam menciptakan inklusif di SMP N 2 Yogyakarta sebagaimana kegiatan sekolah dalam membangun ikatan yang kuat di sekolah. Tentunya hal ini juga membantu peningkatan fasilitas dalam sekolah. seperti; bantuan dana dari komite sekolah yang digunakan dalam menunjang proses belajar mengajar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa meskipun sudah ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu mewajibkan semua sekolah di DIY untuk menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus akan tetapi, masih belum terdapat dukungan nyata dari pemerintah sendiri untuk keberlangsung inklusif. pendidikan Strategi oleh kepala 2 diterapkan **SMPN** Yogyakarta dengan menjalin komunikasi yang baik antara semua unsur dengan memperhatikan komponen-komponen sekolah inklusif dapat menjawab berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi tantangan guna mengembangkan mutu sekolah. Hal tersebut dikarenakan adanya kerja sama dari semua unsur sekolah dalam memaksimalkan peran masing-masing unsur dan memaksimalkan potensi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menyatakan bahwa tenaga maka peneliti mengajukan beberapa saran, yakni: Perlu adanya persiapan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan inklusif, karena masih banyak kekurangan

- dalam mempersiapkan proses pendidikan inklusif tersebut, seperti:
- Memberikan pelatihan kepada seluruh sumber daya manusia untuk meningkatkan pemahaman guru tentang pendidikan inklusif.
- Mengajukan kepada pemerintah untuk pengadaan sarana prasarana yang itu

- akan menunjang keberlangsung pendidikan inklusif.
- memodifikasi kurikulum terkait metode pengajaran untuk mendukung keberlangsung pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M. 2010. Kepemimpinan Inklusif Dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Di Kota Makassar. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Carington Suzanne, Donna Tangen & Denise Beutel. 2018. Inclusive education in the Asia Indo-Pacific region. Australia: Routledge Taylor & Francis Group. Diakses melalui https://doi.org/10.1080/13603116. 2018.1514727.
- Creswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches: Fourth edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Davies, Barbara J & Davies, Brent.

 2004. Strategic Leadership,
 School Leadership &
 Management. Formerly School
 Organisation. DOI:
 0.1080/1363243042000172804.
- Gunawan, Imam. 2017. Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar Praktik. Bandung: Alfabeta.
- Göransson, K., and C. Nilholm. 2014. "Conceptual Diversities and

- Empirical Shortcomings-a Critical Analysis of Research on Inclusive Education." European Journal of Special Needs Education 29 (3): 265–280.
- Hayashi, Makiko. 2014. Comparative Policy Analysis on the Impact of Inclusive Education in Asia and Africa: Focusing on the Right to Education for Children with Disabilities in Cambodia. Journal of International Cooperation in Education, Vol.16 No.2 (2014) pp.21~42.CICE Hiroshima University. Diakses melalui https://doi.org/10.15027/36164.
- Heward, William L. 2003. Ten Faulty
 Notions About Teaching and
 Learning That Hinder The
 Effectiveness of Special
 Education. SAGE Journals.
- https://www.republika.co.id/berita/pend idikan/eduaction/15/05/29/np408 yogyakarta-tetap-terapkancsekolah-inklusi. Diakses pada 16 November 2020 pukul 16.11 WIB Hudayana, 2007. Dadang. **Implementasi** Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Konsep Manajemen Berbasis Sekolah. MBS) (Studi Deskriptif Peningkatan Pelayanan Wajib

- Belajar Pendidikan Dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ijazah. Fauzan. 2019. Anak Dengan Disabilitas Dan Pendidikan. Unicef Indonesia. www.unicef.org/Indonesia/id/doc uments/anak-dengan-disabilitas-dan pendidikan diakses pada Tanggal 16 November 2020 pukul 17.11 WIB.
- L.K.M. Marentek. 2007. Manajemen Pendidikan Inklusif. Jakarta: Depdiknas.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.
- Moelong, Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujito. Dkk, 2012, Pendidikan Inklusif. Jakarta: Baduose Media Jakarta
- Nuzula, M,dkk. 2020. Analisis Manajemen Rencana Keuangan Dan Anggaran Sekolah Inklusif Di SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. DOI:10.35542/osf.io/9wz5t
- Partono, Arif. 2014. Strategic Leadership: Kajian Teori Leadership. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun

- 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.
- Permendikbud RI No.51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos Dan Laporan Keuangan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.
- Radar Jogja.2019. Komite Disabilitas:
 Sekolah Harus Lakukan
 Assessment Siswa Berkebutuhan
 Khusus Calon Siswa Ditolak
 Karena Difabel.
 jawapos.com/2019/07/03/calonsiswa-ditolak-karena-difabel/,
 2019). Diakses 5 Oktober 2020.
- Safitri, Riana. 2012. Pembelajaran Gambar Teknik. Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses melalui respitory.upi.edu
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 380 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Inklusif
- Tarmansyah, 2007. Inklusi Pendidikan Untuk Semua. Jakarta: Depdiknas.
- Tarnoto, Nissa. 2019. Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggaraan

Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. Jurnal Humanitas

Undang-Undang 1945 RI (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Penddiikan Nasional.

United Nations Children's Fund (UNICEF). 2014. Conceptualizing Inclusive Education and Contextualizing it within the UNICEF Mission.

New York WHO, World Bank. (2011) World Report on Disability. Geneva, World Health Organization. http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/. Diakses pada tanggal 15 September 2020.

Wahyudi & Kristiawati. 2016. Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kemendikbud.